

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengawasan**

##### **2.1.1 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan berasal dari akar kata “awas”, mendapat awal “an” dan akhiran “an” artinya adalah penilikan dan penjagaan (Murhaini, 2014:1). Sementara itu pakar lain, yaitu Saiful Anwar dalam (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindari terjadinya penyimpangan.

Menurut Prayudi Atmosudirjon (Murhaini, 2014:3), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya. Pakar manajemen M. Manullang dalam (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman tentang pengawasan dimaksud. Bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitan ini juga terkandung upaya untuk tetap konsistensi di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsistensi inilah relevansinya pengawasan dilakukan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan adalah proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan memegang peranan penting karena tanpa pengawasan yang baik, tujuan yang dicapai akan memuaskan. Dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang meliputi tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi (Mukarom & Laksana, 2015:155).

Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut, dibutuhkan alat bantu manajerial sehingga jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi, tidak terkecuali pengawasan dalam bidang pelayanan publik

Pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Georgy R. Tery dalam (Mukarom & Laksana, 2015) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu,

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Robbin menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi (Mukarom & Laksana, 2015). Menurut Dale dalam (Mukarom, 2015:156) menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan, definisi lain yang berpendapat tentang pengawasan yaitu Siagian dalam (Mukarom, 2015:156) menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi sepertinya halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan atukah belum. Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil pengawasan akan dapat memperbaiki kedudukan perusahaan karena penjualan dapat didorong karena kualitas barang lebih unggul dari saingan, atau harganya bersaing, dan lain-lain. Di dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat

sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

### **2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dari pemerintahan yang telah direncanakan, diperlukan pengawasan karena dengan pengawasan tersebut, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk (Mukarom & Laksana, 2015):

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir dalam (Mukarom & Laksana, 2015) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektik, sehat, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif

### **2.1.3 Mekanisme Pengawasan/Pengaduan**

Mekanisme pengawasan dari masyarakat dari masyarakat yang diatur diatas adalah melalui pengaduan. Adapun pengaduan dilakukan oleh masyarakat apabila penyelenggaraan pelayanan publik (Mukarom & Laksana, 2015):

1. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
2. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

Dalam konteks pengawasan di daerah, pengaduan tersebut ditujukan kepada penyelenggara, ombudsman, dan/ atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota (Pasal 40 UU No 25 tahun 2009). Pengaduan seperti maksud diatas diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. Pengaduan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan menerima pelayanan. Dalam pengaduannya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

#### **2.1.4 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut (Mukarom & Laksana, 2015:158):

a. **Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Adapun pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

b. **Pengawasan Preventif dan Represif**

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, apabila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan Peraturan Daerah atau Keutusan Kepala Daerah tertentu. Selama pengesahan belum diperoleh Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Adapun pengawasan represif berbentuk pengguhan berlaku atau pembatalan. Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepalan Daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan memingikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang bersangkutan. Adapun pengawasan eksternal adalah pengawasan dilakukan oleh aparat dari luar pemerintah. Seperti pengawasan bidang keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sepanjang meliputi seluruh seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap dapertemen dan instansi

pemerintah lain. Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Di samping itu, ada pula beberapa macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya (Mukarom & Laksana, 2015:160), yaitu:

- a. Pengawasan anggaran pendapat (*budgetary control*)
- b. Pengawasan biaya (*cost control*)
- c. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- d. Pengawasan produksi (*production control*)
- e. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhon (2001) dalam (Mukarom & Laksana, 2015:160) dapat dibagi dalam empat jenis, yaitu:

- a. Pengawasan feedforward (pengawasan umpan di depan)  
 Pengawasan sebelum aktivitas dilakukan atau dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.
- b. Pengawasan concurrent (pengawasan bersamaan) Pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan
- c. Pengawasan Feedback (pengawasan umpan balik)

Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan . Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan dan memfokuskan kualitas hasil.

d. Pengawasan Internal-eksternal

Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

### **2.1.5 Tahap Pengawasan**

Tahap pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Donnelly et. al. dalam (Mukarom & Laksana, 2016:193) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. *Preliminary Control*

*Preliminary control* merupakan pengawasan pendahuluan. Salah satu peran pengawasan adalah meneliti setiap usulan anggaran, khususnya dari penyedia layanan publik, dari sisi harga layanan, output, maupun outcomes dari setiap jenis layanan. Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan sebab segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah, unit layanan teknis pelayanan publik bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. Dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara memadai atau tidak.

b. *Interim Control*

*Interim control* merupakan pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan pun dapat diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau masa berjalannya sebuah peraturan.

c. *Post Control*

Selain memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan harapan post control juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Maman ukas (2004) dalam ((Mukarom & Laksana, 2016:194) menyatakan tiga unsur pokok atau tahapan dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut.

1. Ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seseorang masih menaggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tersebut. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi jika dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Menurut Kadarman (2001) dalam (Mukarom & Laksana, 2016:195), langkah-langkah proses pengawasan, yaitu:

1. Menetapkan standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud adalah menentukan standar.
2. Mengukur kinerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
3. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

#### **2.1.6 Asas-Asas Dalam Pengawasan**

Sebagaimana disampaikan oleh Prayudi, dalam (Murhaini, 2014:5) mencapai pelaksanaan pengawasan ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan di jalankan dalam proses pelaksanaan aktivitas. Asas ini saya jadikan sebagai indikator dalam pengawasan. Adapun asas yang dimaksud adalah sebagai berikut (Murhaini, 2014:5):

- a. Asas tercapainya tujuan. Dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk

menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan. Tentu saja ketika perencanaan tersebut dilaksanakan.

- b. Asas efisiensi. Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa agar sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan dari deviasi. Deviasi pasti muncul dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan masalah ikutan yang tidak perlu, khususnya yang berasal dari luar dan datangnya tanpa diduga.
- c. Asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini adalah agar dapat dilaksanakannya perencanaan dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Tidak semata di dasarkan pada adanya pengawasan yang membawa konsekuensi sanksi. Lebih dari itu adalah tanggung jawab internal terhadap proses pelaksanaannya .
- d. Asas pengawasan.  
Maksud asas ini adalah ditujukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari atas ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadi penyimpangan perencanaan yang akan terjadi. Baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
- e. Asas langsung  
Maksudnya bahwa di dalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksanapun mempunyai beban langsung untuk di samping melaksanakan juga melakukan pengawasan
- f. Asas refleksi perencanaan

Maksud dari asas ini bahwa di dalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.

g. Asas penyesuaian dengan organisasi

Maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu sistem yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, di dalam pengawasan pun harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. masing-masing bagian punya kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi.

h. Asas individual

Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.

i. Asas standar

Maksudnya bahwa di dalam pengawasan mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ukuran untuk itu dirumuskan berdasarkan standar yang jelas dan akurat. Akurasi dibutuhkan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai atas dasar pelaksanaan aktivitas dimaksud sehingga benar-benar terarah secara standar. Artinya dapat dicapai berdasarkan rasionalitas yang standar.

j. Asas pengawasan terhadap strategi

Bahwa di dalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan. Atas dasar kemungkinan yang muncul harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail faktor strategi dimaksud.

k. Asas pengecualian

Terkandung maksud bahwa akan muncul faktor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian dimaksud itu ditujukan terhadap faktor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.

l. Asas pengendalian fleksibel

Maksudnya bahwa pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibilitas dibutuhkan untuk menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.

m. Asas peninjauan kembali

Maksudnya di dalam pelaksanaan bahwa pengawasan harus selalu ditinjau. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan.

n. Asas tindakan

Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari pencapaian tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya.

Pada dasarnya pengawasan itu bersifat menyeluruh dan dimensi yang luas. Untuk pelaksanaannya memerlukan konsistensi atas penerapan prinsip pengawasan itu sendiri. Prinsip yang secara konsisten harus dijalankan pada pelaksanaan, yang secara normatif tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya penyimpangan. Penyimpangan sekecil apapun yang terjadi dan ditoleransi secara sadar akan menjadi penghambat. Menghambat pelaksana dari perencanaan yang telah digariskan

Dengan demikian disamping itikad untuk menerapkan pengawasan secara konsisten harus disertai dengan kesungguhan untuk menerapkannya. Hal ini berarti bahwa pengawasan mesti dilaksanakan secara objektif. Objektivitas menjadi kata kunci untuk keberhasilan pengawasan itu sendiri yang niscaya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program yang telah dibuat.

### **2.1.7 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan Yang Efektif**

Untuk menjadi efektif menurut (Handoko, 2016:371) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen* mengenai karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar,

2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat-akurat, 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut.

1. Akurat. informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau palingan tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari

8. proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan organisasi dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
9. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
10. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
11. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggungjawab dan berprestasi.

Selain sepuluh karakteristik pengawasan efektif diatas, perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan adil dari pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa sistem pengawasan harus konsisten dengan kultur sistem organisasi yang bersangkutan.

### **2.1.8 Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan**

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperhatikan oleh organisasi. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut (Handoko, 2016:364):

- a. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan organisasi terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dihindari seperti munculnya inovasi mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa

- b. organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- c. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian yang tersebar luas. Semuanya memerlukan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
- d. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
- e. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan

f. apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

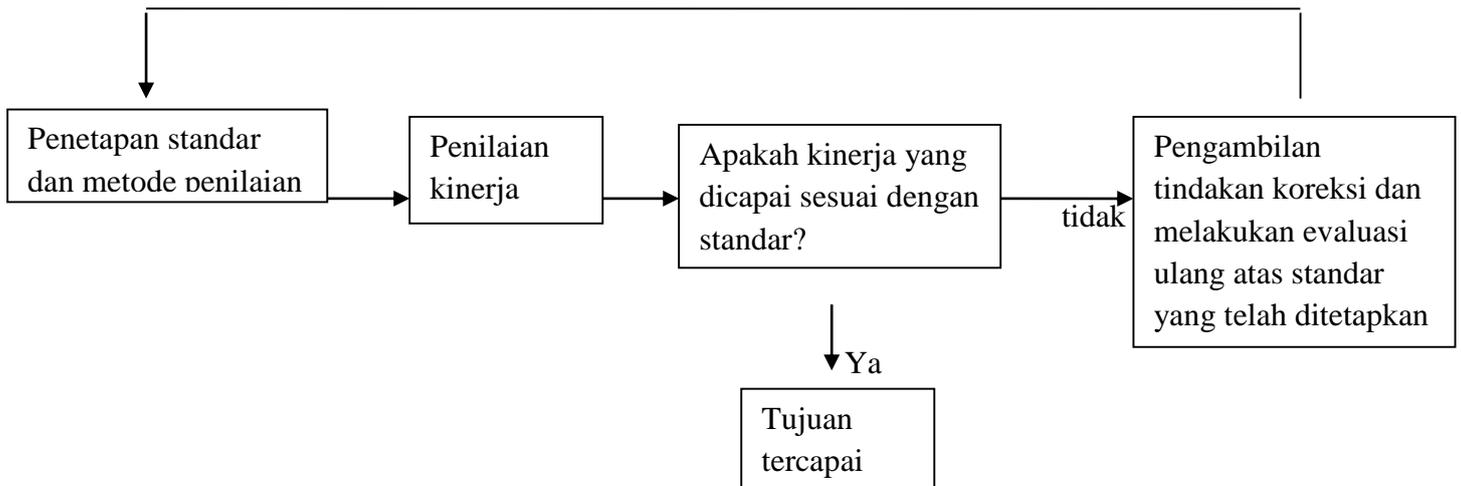
Kata “pengawasan” sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaiknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

### **2.1.9 Langkah-Langkah Dalam Proses Pengawasan**

Langkah-langkah ini sebagaimana diterangkan dalam Gambar 2.1 adalah terdiri dari:

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Membandingkan kinerja dengan standar
4. Pengambilan tindakan koreksi

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Sule & Saefullah, 2014:321) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Manajemen* mengenai langkah-langkah dalam proses pengawasan yang efektif sebagai indikator dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahap-tahap dalam proses pengawasan  
(Sumber: Diadaptasi dari Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000) dalam (Sule & Saefullah, 2014:321)).

## 2.2 Saluran Distribusi

### 2.2.1 Pengertian Saluran Distribusi

Dalam kegiatan manufaktur, distribusi memegang peranan penting dalam menjamin produk yang dipasarkan supaya produk tersebut tersedia secara merata di setiap wilayah. Dapat dibayangkan apabila suatu produk yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata yang akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan produk itu. Kebanyakan, perusahaan manufaktur yang sedang mengalami pertumbuhan memanfaatkan agen distributor untuk pendistribusian produk mereka. Cara ini lebih efektif dan efisien dan dapat mengurangi biaya distribusi yang tinggi jika mendirikan cabang sendiri (Suryanto, 2016:2).

Ada beberapa faktor yang membatasi penyaluran secara langsung dari produsen ke konsumen, yakni sebagai berikut (Suryanto, 2016:3):

1. *Geographical Gap*, perbedaan jarak geografis yang disebabkan oleh perbedaan tempat produksi dengan lokasi konsumen yang tersebar luas.

2. *Time Gap*, perbedaan jarak waktu yang disebabkan perbedaan waktu produksi dengan kebutuhan konsumsi dalam jumlah besar dan menimbulkan nilai guna waktu
3. *Quality Gap*, perbedaan dalam jumlah produksi yang lebih besar akan lebih efisien biaya per unitnya dibandingkan produksi lebih kecil.
4. *Communication dan Information Gap*, perbedaan informasi dan komunikasi yang berbeda di mana produsen tidak mengetahui produk yang dibutuhkan dan siapa konsumen potensialnya. Hal ini menimbulkan nilai guna milik.

### **2.2.2 Saluran Distribusi Paradigma Lama**

Peran Utama dari fungsi distribusi adalah untuk memastikan bahwa produk yang tepat tersedia pada waktu yang tepat. ini menunjukkan pengelolaan saluran distribusi mulai dari sumber pasokan awal hingga terakhir ke konsumen. Ada berbagai tipe dalam pemasaran dan pendistribusian suatu barang (Suryanto, 2017:6).

#### **1. Saluran Outlet Tradisional**

Outlet tradisional adalah outlet yang memiliki sistem operasional yang cukup sederhana atau manual. Saluran tradisional di antaranya yaitu warung, rombongan/gerobak, dan pasar desa/pasar becek

##### **a. Warung**

Warung adalah outlet yang kegiatan utamanya menjual suatu produk dalam bentuk eceran. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai golongan dan membeli untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijual sangat terbatas. Oleh

sebab itu, banyak perusahaan yang sengaja memberdayakan outlet ini dengan cara melayani secara langsung dan harus dengan cara tunai.

b. Rombongan atau Gerobak.

Rombongan atau gerobak adalah outlet yang kegiatan utamanya menjual dalam bentuk eceran. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai golongan dan hanya membeli untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijual sangat terbatas. Outlet ini ada dimana-mana, baik ditempat yang permanen maupun permanen.

c. Pasar Tradisional

Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda. Jumlah pasar tradisional mengalami penurunan dari 181 pasar (2005) menjadi 13.450 pasar (2007), padahal pasar tradisional mempunyai kaitan erat dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

d. Retailer

Retailer adalah outlet yang utamanya menjual secara eceran. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai golongan yang hanya membeli eceran untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijual terbatas pada produk yang terjangkau oleh konsumen. Persediaannya pun terbatas. Kelebihan outlet retailer adalah jumlahnya sangat banyak dibandingkan outlet lainnya. Outlet pengecer ini sangat dalam menjual dan mempromosikan suatu produk ke konsumen secara langsung.

e. Semigrosir

Outlet ini merupakan outlet yang penjualannya secara partai maupun eceran. Kosumen yang dilayani dari berbagai golongan, baik yang membeli yang secara eceran maupun partai untuk dijual lagi. Produk yang dijualnya tidak terbatas, tetapi harus produk yang laku di pasaran. Harga yang dijual juga beragam, tidak hanya untuk golongan menengah ke atas, tetapi juga menyediakan produk untuk kalangan menengah ke bawah. Kelebihan outlet semigrosir adalah mampu membeli produk dalam jumlah melebihi toko eceran. Stok produk dan jumlah item juga banyak .

f. Grosir

Grosir adalah toko yang melayani pembelian di tingkat kulakan. Jumlah outlet lebih sedikit di bandingkan toko semigrosir. Produk yang di jual juga terbatas pada produk yang fast moving. Pangsa pasar toko grosir mencakup toko semigrosir, retail, dan masyarakat yang membeli secara partai

g. Minimarket

Operasional minimarket sama dengan outlet pengecer. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijualnya tidak terbatas pada produk tertentu , tetapi meliputi berbagai jenis produk.

h. Supermarket

Supermarket adalah outlet yang kegiatan operasionalnya hamper sama dengan minimarket yang menjual secara eceran dan partai. Produk yang dijual adalah item yang beraneka ragam sehingga konsumen dapat

memenuhi semua kebutuhannya. Konsumen yang dilayani ialah semua lapisan golongan masyarakat .

i. Hipermarket

Hipermarket merupakan outlet yang kegiatan operasionalnya sama dengan supermarket , yakni menjual produk secara eceran dan partai. Produk yang dijual beraneka ragam , melebihi persediaan stok supermarket.

2. Saluran Outlet Modern

Outlet modern memiliki sistem operasional yang cukup baik dan sistematis dari penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pembayaran. Untuk mengatasi permasalahan di toko tradisional , outlet modern harus berubah menjadi semi-self service atau sekaligus swalayan total. Mereka harus menerims minimarket, misalnya dalam hal penempatan barang, *brand blocking* dan *eye level* agar muncul *impulse purchase*.

### 2.2.3 Saluran Distribusi Kebijakan Publik

1. Makna dan Fungsi Saluran Distribusi

Pada perekonomian saat ini kewajiban saluran distribusi merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting dalam menyalurkan produk ke tangan konsumen. Kesalahan dalam menentukan saluran distribusi akan menghambat dan berpengaruh kurang baik terhadap dan berpengaruh kurang baik terhadap usaha penyebaran produk perusahaan. Saluran distribusi adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantung, yang terlibat dalam proses yang membuat produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Ketentuan perusahaan

dalam memilih saluran distribusi akan menjadikan operasi perusahaan menjadi lebih efisien dalam memperluas pasar, untuk mencapai konsumen yang dituju . Adapun fungsi saluran distribusi, yaitu informasi , promosi, kontak, penyesuaian, dan negosiasi (Anggara, 2014:123).

## 2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Saluran Distribusi (Anggara, 2014:124)

### a. Perilaku dan Organisasi Saluran

Saluran distribusi terdiri atas perusahaan yang mengikat dirinya untuk mencapai sasaran bersama. Dua atau lebih perusahaan pada tingkatan yang sama bekerja sama untuk mempelajari peluang pemasaran yang baru.

### b. Keputusan Rancangan Saluran

Keputusan rancangan saluran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi saluran distribusi disebabkan adanya:

1. Analisis kebutuhan layanan jasa konsumen
2. Menetapkan tujuan dan kendala saluran
3. Identifikasi alternatif utama

### c. Jenis Penyalur

Jenis penyalur dalam faktor yang memengaruhi saluran distribusi, antara lain:

1. Tenaga penjualan perusahaan
2. Agen pabrikan
3. Distributor industri

### d. Banyaknya Saluran Pemasaran

Ada tiga strategi yang tersedia dalam saluran pemasaran , yaitu:

1. Distribusi intensif
2. Distribusi eksklusif
3. Distribusi selektif

e. Tanggung Jawab Anggota Saluran

Setiap perjanjian lisensi pasti ada persyaratan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemegang lisensi jika ingin memasarkan produk produsen. Elemen utama dalam bauran hubungan dagang adalah kebijakan harga, syarat penjualan, hak territorial, dan jasa tertentu yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

f. Evaluasi Alternatif Utama

Mengidentifikasi beberapa alternatif saluran dan ingin memilih salah satu yang paling memenuhi tujuan jangka panjang

g. Merancang Saluran Distribusi Internasional

Tiap-tiap sistem saluran dapat berbeda-beda antara satu negara dan negara lain. Oleh karena itu, pemasar harus mengadaptasikan strategi saluran dengan struktur yang telah ada di tiap-tiap negara.

h. Keputusan Manajemen Saluran

1. Memilih Anggota Saluran

Produsen harus memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan menarik perantara yang berkualitas tinggi, serta harus bekerja keras untuk memperoleh sejumlah perantara yang berkualitas.

2. Memotivasi Anggota Saluran

Perusahaan tidak hanya menjual melalui perantara, tetapi juga pada konsumen. Perusahaan memandang perantara pemasaran sebagai pelanggan tingkat utama.

### 3. Evaluasi Anggota Saluran

Produsen harus memeriksa secara berkala, membandingkan kinerja anggota saluran terhadap standar-standar, seperti tingkat persediaan barang, lama waktu pengiriman, perlakuan terhadap barang yang rusak, kerja sama dalam program promosi dan pelatihan, serta layanan jasa kepada pelanggan .

### 3. Sistem Integrasi Saluran

Saluran distribusi berkembang sangat pesat dengan berbagai sistem pemasaran berbeda. Ada tiga sistem pemasaran yang dikenal saat ini, yaitu sebagai berikut (Anggara, 2014:126).

#### 1. Sistem Pemasaran Vertikal

Dalam praktiknya, sistem ini merupakan sistem kesatuan usaha secara vertical dari mulai produsen, pedagang besar besar, dan pengecer. Semua anggota saluran menyatu untuk memasarkan produk dengan kerja sama yang sangat rapi mulai produsen hingga barang sampai ke konsumen.

#### 2. Sistem Pemasaran Horizontal

Sistem ini merupakan sistem gabungan perusahaan yang melakukan kerja sama untuk memanfaatkan peluang pasar. Misalnya, kerja sama dengan bank dalam hal transaksi atau pembayaran produk.

#### 3. Sistem Pemasaran Multisaluran

Sistem ini merupakan sistem yang melayani berbagai segmen pelanggan. Perusahaan dikatakan memakai sistem ini apabila menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk melayani berbagai segmen pelanggan.

#### **2.2.4 Fungsi Saluran Distribusi**

Dalam pelaksanaan operasional pendistribusian, produsen memiliki mitra dalam hal pendistribusian yang dikenal sebagai distributor. Ada tiga fungsi yang dilakukan oleh mitra/distributor (Swastha, 1999) dalam (Suryanto, 2016:6).

##### **1. Fungsi Pertukaran (*Transaction Function*)**

Fungsi ini memerlukan adanya kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih, baik kegiatan transaksi yang dilakukan pihak mitra/distributor dengan pihak pelanggan maupun produsen. Fungsi dalam pertukaran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian
- b. Penjualan
- c. Pengambilan Resiko

##### **2. Fungsi Penyedia Fisik (*Logistical Function*)**

Fungsi penyedia fisik terjadi setelah adanya proses distribusi, yakni perpindahan produk atau jasa dari produsen melalui mitra/distributor ke konsumen akhir. Ada empat macam yang dilakukan dalam penyedia fisik produk atau jasa, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan
- b. Penyimpanan
- c. Pemilihan

- d. Pengangkutan
3. Fungsi Penunjang (*Supporting Function*)
- Fungsi penunjang memiliki peranan membantu pelaksanaan fungsi lainnya, dii antaranya adalah sebagai berikut.
- a. Pelayanan Purnajual
  - b. Pendanaan
  - c. Penyebaran Informasi
  - d. Koordinasi Saluran
  - e. Pembayaran

#### **2.2.5 Menentukan Struktur Distribusi**

Di dalam menyusun struktur distibusi, yang perlu di perhatikan adalah berikut ini (Suryanto, 2017:27).

- a. Mengkaji terlebih dahulu pola kerja tim distribusi, bukan saja untuk salesman, tetapi juga sales supervisor dan sales manager. Hal ini akan menentukan tingkat efektivitas dan rentang kendali yang perlu ditentukan sejak awal agar organisasi berjalan sesuai arah perusahaan, prioritas tugas yang dikehendaki, sistem pengendalian hingga menentukan kinerja di setiap jabatan dalam organisasi penjualan tersebut.
- b. Kualitas sumber daya manusia (SDM). Kompetensi setiap jabatan akan menentukan pula tingkat efektivitas dan produktivitas oerorganisasi penjualan. Semakin tinggi kualitas SDM yang sesuai dengan kompetensi maka organisasi akan tampak ramping da rentang kendalinya semakin ringan sehingga kemandirian menjalankan tugas semakin tinggi, dan para sales

- c. supervisor dan sales manager dapat mengalokasikan waktunya untuk hal-hal yang lebih strategis.
- d. Sistem penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja kunci (*key performance indicators*) tentunya harus bermula dari syarat awal jabatan, kompetensi jabatan, objektif pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Sebaiknya pengukuran kinerja dilakukan secara periodic, misalnya bulanan. Di beberapa perusahaan, sistem penilaian kinerja karyawan dikaitkan pula dengan sistem insentif.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Safrida, yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendistribusian Gas Bersubsidi Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Dewantara, yang dimuat pada jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 3 (September 2016) (34-60) ISSN 2460-8076. Metode penelitian ini merupakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian serta pendapat para informan maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasikan kebijakan pendistribusian gas (LPG) bersubsidi bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara belum terwujud secara efektif, karena sistim pendistribusiannya menganut sistim terbuka, sehingga warga masyarakat tingkat menengah dan keatas memperoleh gas bersubsidi secara bebas dan terbuka tanpa ada batasan. 2) Hambatan dalam implementasi kebijakan pendistribusian gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara adalah sistim

pendistribusian yang kurang tepat yaitu sistim terbuka, adanya permintaan

pihak tertentu untuk memperoleh gas bersubsidi dalam jumlah tidak terbatas, lemahnya penegakan hukum, persyaratan yang tidak konsisten, terjadi kelangkaan gas bersubsidi di pasar (Safrida, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pendistribusian gas bersubsidi bagi masyarakat miskin sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Dwi Astuti Labiba dan Rizky Wulan Juliani, yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur, yang dimuat pada jurnal Wawasan Yuridika fakultas Hukum Vol. 2 | No. 1 | Maret 2018 | Halaman: 43-56. ISSN 2549-0664. Metode penelitian ini merupakan Yuridis Normatif. Hasil penelitian Prosedur pelaksanaan pendistribusian gas elpiji yaitu: terdapat proses pendistribusian dengan cara memanfaatkan teknologi sistem informasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kemana saja gas elpiji tersebut didistribusikan oleh agen, daerah mana saja yang mengkonsumsi gas elpiji tersebut dan berapa jumlahnya sehingga Pertamina dapat mengetahui kebutuhan pasokan gas elpiji pada setiap agen di wilayah tersebut, yang pada akhirnya diharapkan proses pendistribusian gas akan lebih cepat, akurat, agen dapat bekerja secara baik, efektif, dan efisien. Proses pendistribusian tersebut yaitu, diawali dari agen yang kemudian agen akan mendistribusikan gas elpiji

kepada pangkalan/sub agen, yang akhirnya sampai ke tangan konsumen ataupun pengecer (Labiba & Juliani, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum tentang penataan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram pada pangkalan gas elpiji sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Bonifasius Pasumah dkk yang berjudul Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT. Stemar Jaya yang dimuat pada jurnal jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 (1-9) ISSN : 2337 – 5736. Metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi: aparat pengawasan dan sarana/prasarana. Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas maka dari hasil wawancara dengan Kasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut: “Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Barang dan Jasa yang ada di Kota Bitung sangat di tunjang oleh adanya kompetensi aparatur dan disamping itu tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan“ (Pasumah et al., 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian

ini berfokus pada pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak solar industri PT. Stemar Jaya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

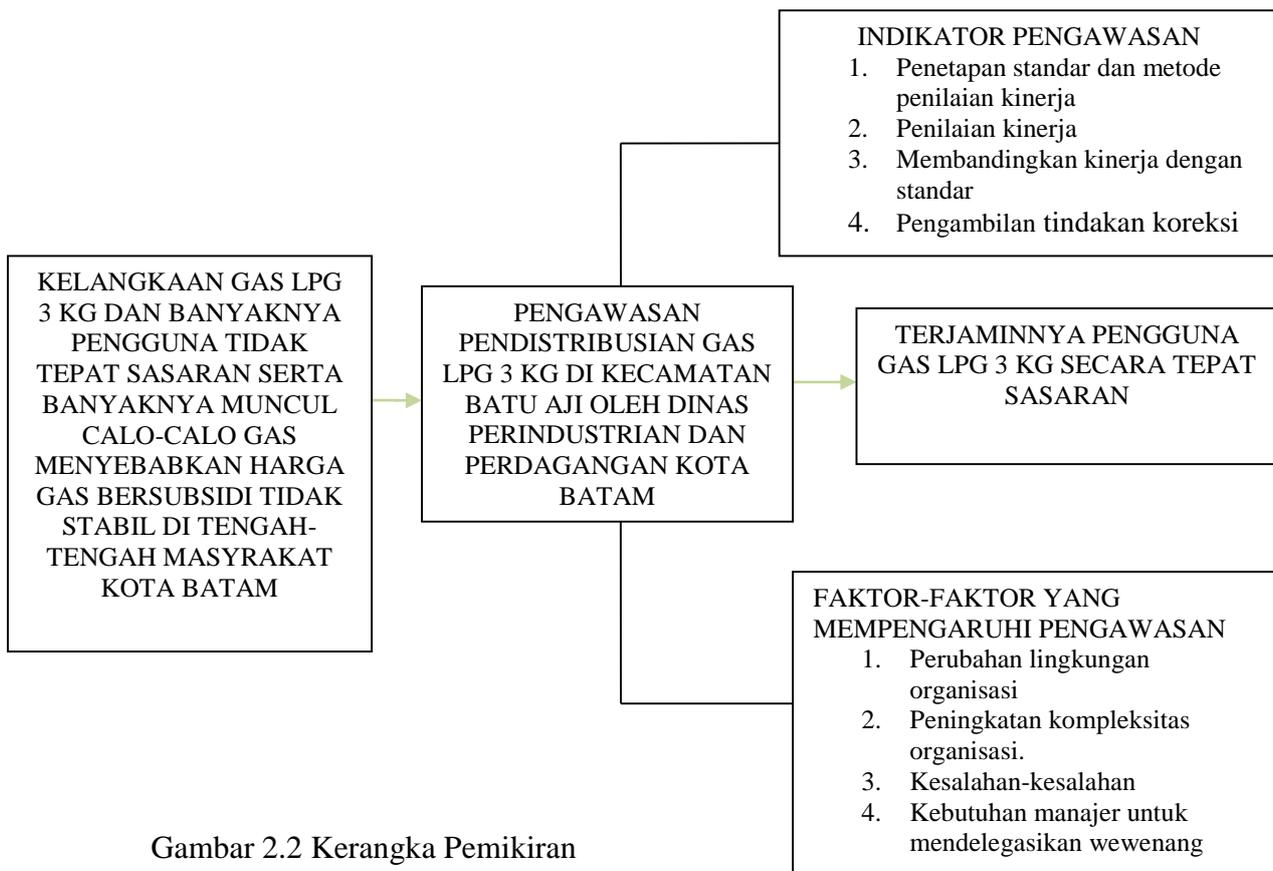
4. Penelitian yang dilakukan oleh Six'on Demokrat Suroso yang berjudul Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) Untuk Masyarakat Kota Samarinda yang dimuat pada jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 1, 2016 (383-397) ISSN 2477-2631. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, dalam penelitian ini, dimana peran dari Seksi Metrologi Legal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang tidak kalah pentingnya dan Seksi Metrologi Legal dalam pengawasan dan penyidikannya telah melaksanakan dengan baik. Ini dapat dilihat dari pengawasan rutin yang dilakukan 3 bulan sekali. Tentunya diharapkan dalam pengawasan Seksi Metrologi Legal kepada setiap SPBU khususnya pada SPBU yang berada di Kecamatan Palaran tidak ada kecurangan, karena bila terjadi kecurangan maka masyarakatlah yang sangat- sangat dirugikan. Meningkatnya jumlah pertumbuhan SPBU tentunya membawa pengaruh yang baik bagi perekonomian Kota Samarinda. Disinilah peran penting dari Seksi Metrologi Legal sebagai Instansi Pemerintahan yang bertugas untuk

melaksanakan fungsinya dalam hal melakukan pengawasan dan penyidikan kepada setiap SPBU agar nantinya berjalan dengan baik dan dapat memberikan sebuah kepuasan kepada setiap pelanggannya (Suroso, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada pengawasan dan penyidikan pada alat ukur stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota Samarinda sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk yang berjudul Implementasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Terhadap Uji Alat Ukur Lpg 3 Kg Di SPPBE Kota Samarinda yang dimuat pada jurnal Jurnal Beraja Niti Fakultas Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 8 Tahun 2014 (1-16) ISSN : 2337-4608. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Implementasi pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap uji alat ukur elpiji 3 kg di SPPBE kota Samarinda masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasarkan pada hasil kegiatan kemetrologian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Seksi Metrologi Kota Samarinda yang mengemban tugas memberikan perlindungan kepada masyarakat mengenai kebenaran pengukuran dan kepastian huum di dunia usaha sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1981 tentang Metrologi Legal. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapatnya tabung elpiji 3 kg yang isinya tidak sesuai dengan yang tertera pada label dan telah melewati batas toleransi (Lisi, Susanti, & Wahyudi, 2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada implementasi pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal terhadap uji alat ukur LPG 3 kg Di SPPBE kota Samarinda sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran  
(Sumber: Hasil Penelitian 2018-2019)